

ANALISIS DAYA TARIK INVESTASI DI PROVINSI JAMBI

Haryadi

Doktor Ilmu Ekonomi, Tataniaga dan Perdagangan Internasional, Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Jambi, Kampus Pinang Masak, UNJA Mendalo Darat, email: haryadi_kamal@yahoo.com

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara umum semua daerah menyadari bahwa untuk mempercepat proses pembangunan, dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Pemerintah daerah dihadapkan kepada dilema yang cukup rumit. Di satu sisi terdapat keinginan untuk membangun dengan menggunakan kemampuan sendiri tanpa harus bergantung kepada pihak lain. Di sisi lain, sebagian besar daerah mengalami keterbatasan dana untuk melaksanakan kegiatan pembangunannya. Sumber pendanaan yang secara kasat mata bisa menjadi alternatif untuk mewujudkan visi dan misi daerah adalah dengan menarik investasi baik domestik maupun asing.

Bentuk dan upaya menciptakan daya tarik investasi di setiap daerahpun bermacam ragam. Mulai dari membuat slogan yang indah, mengekspos perjanjian kerjasama secara besar-besaran, bahkan sampai kepada pernyataan memberikan kepastian keamanan serta membangun sistem pelayanan penanaman modal (Simpedal) dan menyelesaikan urusan administrasi penanaman modal melalui satu atap atau satu pintu (one stop servis). Beberapa daerah malah menciptakan Peraturan Daerah (Perda) yang tujuannya adalah untuk meningkatkan daya tarik investasi masuk.

Otonomi daerah di satu sisi telah memberikan peluang yang cukup besar kepada daerah untuk menarik investasi swasta sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan. Namun demikian, peluang tersebut telah pula menciptakan persaingan yang semakin tajam antar daerah dalam menarik investasi ke daerah masing-masing. Persaingan yang sehat mengharuskan pemerintah daerah untuk menyiapkan segala macam yang terbaik sehingga mampu menarik investasi, orang dan industri untuk masuk ke wilayah masing-masing.

Menurut KPPOD (2003), terdapat beberapa faktor-faktor yang menentukan daya tarik investor untuk masuk ke suatu daerah. Faktor-faktor tersebut diperkirakan juga relatif sama dengan yang terjadi untuk provinsi Jambi. Lebih jauh menurut KPPOD faktor-faktor tersebut adalah faktor Kelembagaan, Sosial Politik, Ekonomi Daerah, Tenaga Kerja dan Infrastruktur Fisik. Pada tahun 2002 dan 2003 KPPOD melakukan penelitian terhadap 134-200 Kabupaten/Kota di Indonesia untuk mengetahui bobot masing-masing faktor tersebut. Hasil penelitian KPPOD menunjukkan bahwa faktor kelembagaan memiliki bobot tertinggi diantara faktor-faktor yang menjadi daya tarik investasi (Tabel 1). Faktor lainnya yang juga memiliki bobot yang cukup tinggi adalah kondisi sosial politik. Keamanan, sosial politik, dan budaya adalah tiga indikator yang termasuk dalam faktor ini.

Tabel 1. Bobot Pemingkat Daya tarik investasi Kabupaten/kota di Indonesia menurut penelitian KPPOD Tahun 2002-2003

Faktor	2002 (%)	2003 (%)
Kelembagaan	31	31
Sosial Politik	26	26
Ekonomi Daerah	17	17
Tenaga Kerja	13	13
Infrastruktur Fisik	13	13

Sumber: KPPOD (2002,2003)

Sebagai salah satu provinsi yang sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan di segala bidang, provinsi Jambi pun tak kalah gencarnya dalam upaya menarik investor. Wujud nyata dari upaya tersebut ditunjukkan oleh gencarnya upaya promosi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi baik dalam mengikuti pameran di berbagai daerah, berkunjung ke luar negeri untuk mempromosikan potensi investasi provinsi Jambi, mendirikan pusat promosi di Singapura, serta mengundang langsung para investor datang ke Jambi agar mereka lebih yakin menanamkan modalnya di Jambi. Bukti keseriusan pemerintah provinsi salah satunya ditunjukkan oleh terus meningkatnya anggaran yang digunakan untuk promosi dari tahun ke tahun. Namun demikian, berdasarkan data perkembangan penanaman modal baik domestik maupun asing, upaya tersebut ternyata tidak terlalu berdampak signifikan terhadap peningkatan investasi yang masuk ke Jambi (Tabel 2).

Provinsi Jambi sesungguhnya memiliki potensi dan peluang investasi yang cukup besar. Hampir semua sektor memiliki potensi untuk dikembangkan. Potensi ini juga layak ditawarkan kepada investor. Prospek investasi di Provinsi Jambi juga cukup menjanjikan, apalagi provinsi ini diuntungkan oleh letaknya yang strategis. Selain dekat dengan salah satu pusat perdagangan dunia (Singapura), Jambi juga merupakan salah satu wilayah yang berada dalam kawasan segi tiga emas (*gold triangle*) yaitu kawasan segi tiga emas Indonesia, Malaysia, Singapura (IMS-GT) dan Indonesia, Malaysia, Thailand (IMT-GT).

Secara jujur harus diakui bahwa selama ini, strategi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Jambi dalam menarik investasi hanya berdasarkan pandangan pemerintah daerah semata. Belum ada kajian yang melihat faktor-faktor yang menjadi daya tarik investor dalam menanamkan modalnya di suatu daerah. Untuk mengupayakan agar provinsi Jambi dapat menjadi salah satu wilayah yang menarik bagi investor/penanam modal, selain melakukan promosi, perlu pula diketahui faktor-faktor yang menjadi daya tarik investasi dari sisi investor. Atas dasar latar belakang ini, maka penelitian yang mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi daya tarik investasi ke Jambi amat perlu dilakukan.

1.2. Perumusan Masalah

Upaya pemerintah provinsi Jambi dalam menarik investasi tidak diragukan lagi. Keseriusan pemerintah tidak hanya terlihat sebagai jargon saja, namun keseriusan tersebut terlihat nyata dari jumlah dana yang dialokasikan untuk membiayai promosi atau kegiatan lainnya. Namun demikian, terdapat

perbedaan antara harapan dan kenyataan. Besarnya harapan akan pesatnya investor yang masuk ke Jambi tidak diikuti oleh fakta yang ada. Data menunjukkan bahwa capaian realisasi terhadap persetujuan investasi yang telah diberikan oleh pemerintah provinsi Jambi masih relatif kecil. Seperti terlihat pada Tabel 2, selama kurun waktu 2002-2005, persetujuan yang berhasil direalisasikan masih berada dibawah 30 persen baik itu untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Luar Negeri (PMA).

Secara umum investasi akan masuk ke suatu daerah tergantung dari daya tarik daerah tersebut terhadap investasi, dan adanya iklim investasi yang kondusif. Keberhasilan daerah untuk meningkatkan daya tariknya terhadap investasi salah satunya tergantung dari kemampuan daerah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan investasi dan dunia usaha serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

Tabel 2. Rencana dan Realisasi Investasi di Provinsi Jambi 2004-2006 (milyar rupiah)

No	Sektor	Tahun 2004		Tahun 2005		Tahun 2006	
		Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	Perkebunan	4.508,11	2.214,50	4.885,94	2.408,87	2.213,14	2.708,99
2	Tanaman Pangan	-	-	-	-	-	-
3	Kehutanan	609,48	573,41	597,19	573,41	597,19	573,41
4	Industri Perkayuan	2.774,46	1.124,39	2.772,95	1.158,09	2.772,95	1.158,09
5	Industri Kimia	505,69	221,20	443,07	286,68	443,07	286,68
6	Ind. Pengolahan Klp. Sawit	569,81	229,57	506,62	190,77	506,62	190,77
7	Industri Makanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Industri Pulp	627,12	24,28	790,26	24,25	790,26	24,25
9	Industri Logam Dasar	19.176,15	4.080,95	19.176,15	4.080,95	19.176,15	4.080,95
10	Industri Kapal Kayu	36,90	18,50	36,90	18,50	36,90	18,50
11	Industri Minyak Pelumas	50,88	7,67	50,88	7,67	50,88	7,67
12	Industri Sepeda Motor	60,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
13	Angkutan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	parpostel	1,66	0,00	1,66	0,00	1,66	0,00
15	Pertambangan & Energi	39,78	7,75	77,25	39,78	77,25	78,70
16	Real Estate	222,69	0,00	301,13	0,00	301,13	0,00
17	Industri Kimia Dasar	-	-	-	-	507.000,00	-
	Jumlah	9.191.901,24	8.534.189,37 1,94%	0.240.754,83	8.788.966,51 2,98%	1.074.963,8	9.128.009 3,86

Sumber: Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi Jambi (2007)

Kesenjangan antara keseriusan pemerintah dan peningkatan alokasi dana promosi dengan rendahnya realisasi investasi menimbulkan pertanyaan: apakah Jambi masih menarik bagi investor? Bagaimana persepsi pengusaha terhadap daya tarik investasi di Jambi?. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah provinsi Jambi untuk mendorong investasi?

1.3. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persoalan-persoalan yang menjadi kendala bagi pemerintah Provinsi Jambi dalam menarik investasi masuk ke dalam negeri. Secara khusus tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui gambaran perkembangan investasi di provinsi Jambi.
2. Untuk melakukan pemeringkatan faktor-faktor dominan yang menentukan daya tarik provinsi Jambi terhadap investasi berdasarkan persepsi pelaku usaha di Daerah ini.
3. Untuk menganalisis persepsi para pelaku usaha di di Jambi terhadap Kondisi Pelayanan Pengurusan Izin Usaha Di Provinsi Jambi

1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak baik akademisi maupun pengambil kebijakan. Manfaat tersebut adalah:

1. Dapat memperkaya informasi ilmiah terutama yang menyangkut kajian tentang liberalisasi perdagangan sehingga bisa menjadi rujukan bagi para peneliti berikutnya.
2. Dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan terutama menyangkut kebijakan tentang penanaman modal.
3. Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi pengambil kebijakan dalam menentukan skala prioritas termasuk dalam menentukan alokasi anggaran yang mampu mendorong masuknya investasi ke Provinsi Jambi.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

1. Penelitian ini akan dibatasi pada analisis mengenai daya tarik investasi di Provinsi Jambi.
2. Daya tarik investasi yang akan dianalisis bersumber dari persepsi pengusaha atau penanam modal atau investor yang menanamkan modalnya di Jambi.
3. Daya tarik investasi yang dilihat berdasarkan persepsi pengusaha menyangkut lima aspek yaitu aspek kelembagaan, sosial politik, ekonomi daerah, ketenaga kerjaan, dan infrastruktur fisik
4. Aspek kelembagaan meliputi aparatur dan pelayanan, perda dan kebijakan, keuangan daerah, kepastian hukum.
5. Aspek sosial politik adalah menyangkut keamanan, sospol, dan budaya
6. Aspek ekonomi daerah difokuskan kepada potensi ekonomi, struktur dan perbankan.

7. Aspek ketenagakerjaan yang akan dikaji difokuskan pada produktivitas, biaya, dan ketersediaan tenaga kerja
8. Aspek infrastruktur fisik menyangkut ketersediaan dan kualitas dari infrastruktur itu sendiri.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Arti Penting Investasi

Secara umum investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran untuk membeli barang modal dan perlengkapan produksi guna menambah kemampuan produksi barang dan jasa dalam perekonomian. Pertambahan jumlah barang modal memungkinkan perekonomian tersebut menghasilkan lebih banyak barang dan jasa di masa yang akan datang. Selaras dengan sudut pandang ini, Mankiw (2005) mengartikan investasi sebagai barang-barang yang dibeli untuk penggunaan di masa depan.

Sebagai salah satu komponen pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), investasi menempati posisi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sebagai pembantuan modal tetap bruto, pengertian investasi mencakup kegiatan tentang pengadaan, pembuatan, dan pembelian barang-barang modal baru dari dalam negeri / wilayah dan barang modal baru atau bekas dari luar negeri / wilayah, yang digunakan untuk proses produksi di dalam negeri / wilayah tersebut. Barang-barang yang dikategorikan ke dalam barang-barang modal adalah barang-barang yang mempunyai unsur pemakaian satu tahun atau lebih, dan yang dimaksud dengan pemakaian adalah penggunaan barang-barang modal tersebut sebagai alat tetap dalam proses produksi.

2.2. Peran Investasi Terhadap Pembangunan

Peran investasi terhadap pembangunan telah banyak dibahas dalam teori-teori pertumbuhan. Beberapa teori yang secara gamblang menjelaskan peran tersebut antara lain adalah teori Harrod-Domar (HD), Teori Solow, dan Teori pertumbuhan baru. Harrod-Domard (Haryadi, 2007) berusaha memadukan pandangan kaum Klasik yang dianggap terlalu menekankan pada sisi penawaran (*Supply Side*) dan pandangan Keynes yang lebih menekankan pada sisi permintaan (*demand side*). Kedua ahli tersebut mengatakan bahwa investasi memainkan peran ganda. Disatu sisi investasi akan meningkatkan kemampuan produktif (*productive capacity*) dalam perekonomian, sementara disisi lain investasi juga akan menciptakan permintaan (*demand creating*) di dalam perekonomian. Oleh karena itu, H-D menyatakan bahwa investasi merupakan faktor penentu yang sangat penting terhadap pertumbuhan ekonomi.

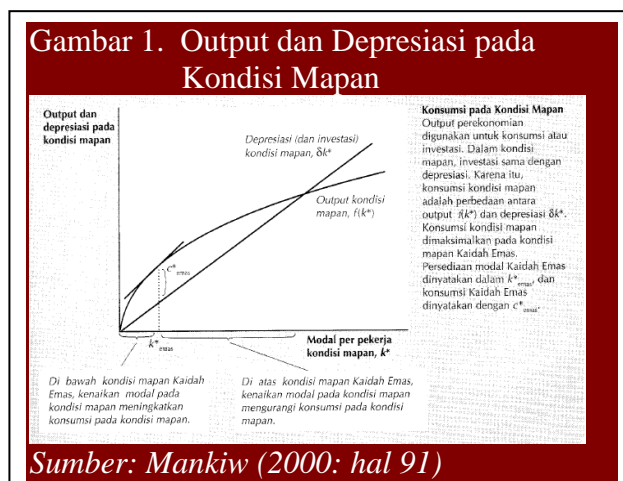
Peran investasi terhadap pembangunan juga dikemukakan oleh Sollow (Mankiw, 2000). Model pertumbuhan Solow memperlihatkan bagaimana pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja, kemajuan teknologi berinteraksi dalam perekonomian, serta bagaimana pengaruhnya terhadap output barang dan jasa suatu negara secara keseluruhan. Seperti halnya kebanyakan model pertumbuhan lainnya, model Solow juga

menganggap bahwa penawaran dan permintaan terhadap barang memainkan peranan penting dalam suatu perekonomian. Secara teoritis, penawaran barang didasarkan pada fungsi produksi yang menyatakan bahwa persediaan output bergantung pada persediaan modal dan angkatan kerja.

Modal dalam bentuk investasi akan diperoleh dari tabungan. Tabungan yang tinggi juga bukan suatu hal yang bagus jika tidak diinvestasikan. Tugas pembuat kebijakan adalah menetapkan tingkat tabungan yang ideal atau tingkat kondisi mapan dalam perekonomian agar bisa memaksimalkan kesejahteraan individu. Oleh karena individu umumnya hanya peduli pada konsumsi (bukan pada modal dan jumlah output), maka seorang pembuat kebijakan yang jeli akan memilih kondisi mapan dengan tingkat konsumsi tertinggi. Nilai kondisi mapan yang memaksimalkan konsumsi inilah yang disebut tingkat midal kaidah emas (*Golden Rule Level of Capital*) (Mankiw, 2000).

Untuk menentukan apakah perekonomian berada pada tingkat kaidah emas atau tidak, prosesnya dimulai dengan identitas perhitungan pendapatan nasional. Konsumsi adalah output dikurangi investasi. Karena yang ingin dicari adalah konsumsi pada kondisi mapan, maka terlebih dahulu nilai kondisi mapan diganti untuk output dan investasi. Output per pekerja pada kondisi mapan adalah $f(k^*)$, dimana k^* adalah persediaan modal per pekerja pada kondisi mapan. Selanjutnya karena persediaan modal tidak berubah, maka investasi sama dengan penyusutan δk^* . Dengan mengganti $f(k^*)$ untuk y dan δk^* untuk i , maka persamaan tersebut dapat ditulias sebagai $c^* = f(k^*) - \delta k^*$. Menurut persamaan ini konsumsi kondisi mapan adalah sisa dari output kondisi mapan setelah dikurangi depresiasi pada kondisi mapan. Gambar 1 menunjukkan output dan depresiasi pada kondisi mapan sebagai fungsi dari persediaan modal kondisi mapan. Gambar 1 menunjukkan output pada kondisi mapan adalah sisa dari output kondisi mapan setelah dikurangi depresiasi pada kondisi mapan.

Jika model Harrod - Domar hanya memfokuskan pada faktor tabungan dan investasi, maka dalam model ini, selain faktor kapital, Solow juga menekankan pentingnya faktor *tenaga kerja* dan *teknologi*. Banyak para ahli ekonomi yang meyakini bahwa model pertumbuhan Solow adalah titik awal bagi sebagian besar analisis ekonomi, bahkan untuk model-model yang secara mendasar berbeda dari model Solow, akan lebih mudah dipahami dengan model pertumbuhan Solow ini.



Model Solow memfokuskan pada empat variabel: output (Y), modal (K), tenaga kerja (L) dan "pengetahuan" atau "efektivitas tenaga kerja" (A). Pada waktu tertentu, ekonomi memiliki sejumlah modal, tenaga kerja, dan pengetahuan yang kombinasinya menghasilkan output. Fungsi

produksi akan berbentuk: $Y(t) = F(K(t), A(t)L(t))$, dimana t adalah waktu.

Model yang telah dikembangkan oleh para ahli yang telah disebutkan diatas ternyata belum memberikan jawaban yang memuaskan tentang pertumbuhan ekonomi. Atas dasar alasan tersebut muncullah teori modern. Dalam teori ini, faktor-faktor yang krusial tidak hanya L dan K, tetapi juga pertumbuhan T (yang terkandung di dalam barang modal dan mesin), E, Kewirausahaan (Kw), bahan baku (BB), dan material (Mt). Selain itu faktor lain yang oleh teori modern juga dianggap sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi adalah ketersediaan dan kondisi infrastruktur, hukum serta peraturan, stabilitas politik, kebijakan pemerintah (yang antara lain dicerminkan oleh pengeluaran pemerintah), birokrasi, dan dasar tukar internasional (TOT). Pentingnya faktor-faktor ini dapat dilihat dari kasus-kasus negara Afrika. Menurut hasil studi yang ada (Tambunan, 2003), terhentinya pembangunan ekonomi di negara tersebut antara lain disebabkan oleh kualitas Lnya yang rendah, politik yang tidak stabil, peperangan, defisit keuangan pemerintah dan keterbatasan infrastruktur.

Dilihat dari kerangka pemikiran teori modern tersebut, ada sejumlah perbedaan mendasar dengan teori neoklasik. Diantaranya adalah menyangkut L, K, dan Kw. Dalam teori modern, kualitas L lebih penting dari pada kuantitasnya. Kualitas L tidak hanya dilihat dari tingkat pendidikan, tetapi juga dari kualitas kesehatannya. Sekarang ini tingkat pendidikan dan kondisi kesehatan menjadi dua variabel bebas yang penting di dalam analisis- analisis empiris dengan pendekatan ekonometris mengenai pertumbuhan ekonomi (Haryadi, 2007).

2.3. Studi Tentang Investasi Di Indonesia

Secara teoritis, kebijakan untuk menarik investasi tidaklah berdiri sendiri. Terdapat suatu keterkaitan antara suatu kebijakan dengan kebijakan lainnya. Bank Dunia (2005a) menyatakan bahwa untuk menciptakan suatu iklim investasi, diperlukan suatu kebijakan investasi yang mampu menangani paling tidak tiga hal berikut: biaya, risiko, dan pembatasan bagi persaingan. Jika pemerintah tidak mampu menekan biaya, meminimalkan resiko, dan membatasi persaingan, maka investasi baik domestik maupun asing akan sulit untuk ditingkatkan.

Tiga faktor lain yang juga amat penting adalah kestabilan politik dan ekonomi serta jaminan keamanan karena memiliki sangat berpengaruh terhadap tingkat resiko usaha. Dalam kasus negara berkembang dan negara miskin, ketiga bagian ini sering didengungkan, akan tetapi dalam kenyataannya sering tidak sesuai. Sejumlah faktor lain yang juga berpengaruh pada iklim berinvestasi adalah kondisi infrastruktur dasar (listrik, telekomunikasi dan prasarana jalan dan pelabuhan), berfungsinya sektor pembiayaan dan pasar tenaga kerja (termasuk isu-isu perburuhan), regulasi dan perpajakan, birokrasi (dalam waktu dan biaya yang diciptakan), masalah good governance termasuk korupsi, konsistensi dan kepastian dalam kebijakan pemerintah yang langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keuntungan neto atas biaya resiko jangka panjang dari kegiatan investasi.

Hasil survey Bank Dunia (World Bank, 2005) menunjukkan bahwa diantara faktor-faktor tersebut, stabilitas ekonomi makro, tingkat korupsi, birokrasi, dan kepastian kebijakan ekonomi merupakan empat faktor terpenting. Walaupun sedikit berbeda dalam peringkat kendala investasi antar negara, hasil survei Bank Dunia tersebut didukung oleh hasil survei tahunan mengenai daya saing negara yang dilakukan oleh *The World Economic Forum* (WEF, 2006). Tiga faktor penghambat bisnis yang mendapatkan peringkat paling atas adalah berturut-turut birokrasi yang tidak efisien, infrastruktur yang buruk, dan regulasi perpajakan.

Hasil survei dari JETRO mengenai faktor-faktor penghambat pertumbuhan bisnis atau investasi di sejumlah negara di Asia menunjukkan gambaran yang sedikit berbeda. Untuk Indonesia (ID), permasalahan utama investasi ternyata menyangkut upah buruh yang makin mahal, disusul dengan sistem perpajakan yang sulit dan rumit. Di Malaysia (M) dan Singapura, upah yang mahal juga merupakan permasalahan paling besar yang dihadapi pengusaha. Di Thailand (Th) faktor terbesar adalah prosedur perdagangan yang rumit, sedangkan di Filipina (F), Vietnam (V), dan India (In), faktor terbesar adalah kondisi infrastruktur yang buruk.

Masalah perburuhan, mulai dari tingkat upah yang terus meningkat akibat penerapan kebijakan upah minimum, kualitas sumber daya manusia yang rendah, termasuk rendahnya penguasaan atas teknologi, hingga hubungan industrial memang belakangan ini semakin memperburuk keunggulan komparatif Indonesia dalam tenaga kerja. Survei yang dilakukan LPEM (2005) menunjukkan bahwa biaya untuk mengatasi masalah tenaga kerja mencapai 5% dari biaya produksi tahunan. Dari sekitar 600 responden, 12,6% menyatakan mengalami perselisihan dalam penentuan upah, 5,8% mengalami masalah dengan jaminan sosial tenaga kerja, dan 8,4% mengalami masalah dengan serikat buruh (ISEI, 2006).

Masalah serius lainnya adalah peningkatan biaya melakukan bisnis yang timbul karena eksekusi pelaksanaan otonomi daerah. Keterbatasan anggaran dan lemahnya prioritas kebijakan menyebabkan timbulnya tekanan untuk meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah tanpa memperhitungkan daya dukung perekonomian lokal dan nasional. Pengenaan pungutan atas lalu lintas barang dan penumpang antar provinsi atau antar kabupaten hanya merupakan satu contoh. Peningkatan hambatan birokrasi perijinan dan beban retribusi baru yang diundangkan berbagai pemerintah daerah dengan alasan untuk meningkatkan penerimaan asli daerah (PAD) menimbulkan peningkatan biaya bisnis, yang berarti juga memperbesar risiko kerugian bagi investasi, dan merupakan lahan subur bagi praktek-praktek korupsi.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung maupun tidak langsung dengan pihak-pihak terkait. Data primer yang dibutuhkan dalam analisis ini adalah (1) data mengenai persepsi pengusaha untuk. Berdasarkan data ini dapat ditentukan bobot faktor, variabel, dan indikator yang mempengaruhi daya tarik investasi berdasarkan persepsi dunia usaha. (2) data persepsi dunia usaha berkaitan dengan

daya tarik investasi suatu daerah, yang diperoleh melalui survei lapangan (*face to face interview*) dan pengisian daftar pertanyaan. Untuk mendapatkan informasi yang berimbang, maka telah diupayakan pula untuk mendapatkan informasi dari instansi-instansi terkait.

Sementara itu data sekunder diperoleh dari instansi-instansi terkait, antara lain Bapemproda Provinsi Jambi, Dinas Perindustrian Provinsi Jambi, Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, Dinas Pertanahan Provinsi Jambi, Dinas Perikanan Provinsi Jambi, Dinas Pertambangan Provinsi Jambi, Dinas Perdagangan Provinsi Jambi, Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi, BPS, serta instansi-instansi terkait di kabupaten dan kota. Data sekunder dimaksud adalah berupa data-data statistik daerah (*existing statistic data*) yang dikumpulkan pada penelitian terdahulu maupun laporan yang diberikan oleh pemerintah, diantaranya adalah Perda, Statistik Ekonomi, Ketenagakerjaan, Infrastruktur, Demografi dan sebagainya.

3.2. Metode Pengambilan Sampel

Penentuan sampel dilakukan secara purposive sampling. Responden yang dijadikan sampel merupakan pengusaha/pelaku usaha yang memiliki perusahaan kecil, menengah dan besar yang ada di Provinsi Jambi, dengan demikian responden diyakini berpengalaman berurusan dengan pemerintah dan memahami permasalahan yang terjadi di provinsi Jambi. Dari 10 (sepuluh) kabupaten/kota yang ada di provinsi Jambi, terpilih 5 (lima) kabupaten sebagai lokasi penelitian.

Kabupaten terpilih didapat dengan beberapa pertimbangan antara lain banyaknya perusahaan yang berada di kabupaten tersebut serta karakteristik dari kabupaten. Pada penelitian ini kabupaten yang akan dijadikan lokasi penelitian adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Sarolangun,.

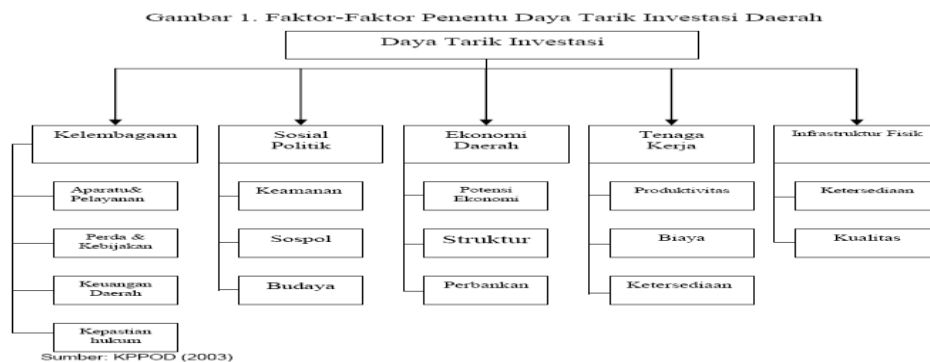
Responden yang dipilih adalah pelaku usaha yang memiliki kemampuan, pengetahuan, pengalaman dan pemahaman mengenai kegiatan bisnis di Provinsi Jambi. Penelitian ini mengutamakan responden pemilik, pemilik sekaligus pengelola atau pengelola suatu usaha karena penelitian ini menitikberatkan pada persepsi pengusaha terhadap investasi daerah.

Studi ini tidak mengutamakan kuantitas responden melainkan kualitas responden sehingga data yang diperoleh dalam kuesioner mempunyai nilai objektivitas yang tinggi sesuai dengan pengetahuan, pengertian, kepercayaan individu tentang objek sikap (kognitif) karena pengalaman. Selain itu, responden yang diwawancarai ada juga yang berkedudukan ganda, selain sebagai penrusaha juga sebagai pengurus asosiasi bisnis yang diharapkan dapat mewakili aspirasi para anggota asosiasinya.

Pengumpulan data persepsi dunia usaha tentang daya tarik serta gambaran investasi daerah dilakukan dengan wawancara mendalam (*in depth interview*) dipandu dengan kuesioner Analytical Hierarchy Process (AHP). Dalam penelitian ini, responden total berjumlah 60 orang pelaku usaha yang ada di Provinsi Jambi.

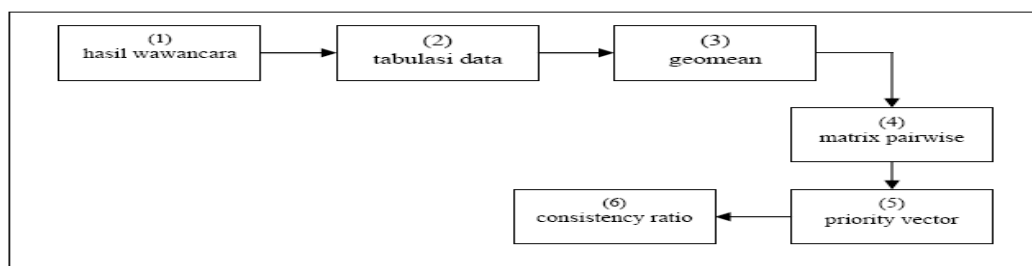
3.3. Metode Analisis

Faktor dan variabel yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan yang digunakan oleh KPPOD dalam penelitiannya mengenai daya tarik investasi daerah tahun 2002,2003. Alat analisis yang digunakan adalah AHP (Analytical Hierarchy Process). AHP memecah suatu permasalahan investasi daerah secara hirarki seperti terlihat pada Gambar 1.



Alat analisis yang digunakan adalah AHP (Analytical Hierarchy Process). AHP memecahkan suatu permasalahan investasi daerah secara hirarki seperti terlihat pada gambar di atas.

Gambar 2. Tahapan pembobotan dalam AHP



Bobot yang lebih besar dari suatu faktor atau variabel menunjukkan faktor atau variabel tersebut lebih penting dibandingkan dengan faktor atau variabel lainnya dalam menentukan daya tarik investasi suatu daerah menurut persepsi pelaku usaha. Tahapan pembobotan dalam AHP dapat dilihat dalam Gambar 2. Dengan memasukkan unsur persepsi maka metode AHP dapat mengatasi kelemahan utama pada metode pengambilan keputusan yang selama ini sering dikenal dengan kelemahan dalam mengubah data kualitatif ke dalam bentuk kuantitatif. Selain itu AHP juga mampu memberikan prioritas alternatif dan melacak ketidakkonsistenan dalam pertimbangan dan preferensi seorang responden (Saaty, 2002).

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Karakteristik Responden

Jumlah responden yang disurvei adalah 60 pengusaha di Jambi. Namun demikian hanya 49 pengusaha yang berhasil diwawancarai dan bersedia mengembalikan daftar pertanyaan yang diberikan, sedangkan 5 pengusaha bersedia diwawancarai namun tidak bersedia mengembalikan kuesioner yang

diberikan kepada mereka, sementara 6 pengusaha tidak bersedia baik diwawancarai maupun mengembalikan kuesioner. Sebagian besar responden merupakan direktur perusahaan. Berdasarkan status perusahaan, 28 perusahaan atau sekitar 47 persen merupakan perusahaan cabang sedangkan kantor pusatnya berada di Jakarta, hanya 4 perusahaan yang merupakan kantor pusat, sedang sisanya merupakan ranting.

Dari hasil survey, 42,86 persen merupakan direktur utama, sedangkan 20 persen merupakan direktur. Hasil survey juga menunjukkan bahwa 48,98 persen menempati jabatan manejer, 6,12 persen merupakan kepala bagian, dan 2,04 persen sebagai wakil direktur. Hasil survey ini sekaligus menunjukkan bahwa semua responden adalah pejabat di perusahaan masing-masing. Atas dasar tersebut maka dapat diyakini bahwa responden cukup representatif untuk mewakili perusahaan dalam upaya mendapatkan informasi yang tepat dan benar dalam proses wawancara pengisian daftar kuesioner.

Hasil survey juga menunjukkan bahwa responden memiliki tingkat pengetahuan yang baik. Kenyataan ini diindikasikan oleh 42 responden atau 84 persen berpendidikan Strata (S1), dan hanya 7 orang atau 16 persen yang berpendidikan SMA. Umumnya responden yang berpendidikan SMA adalah direktur perusahaan dengan umur diatas 50 tahun. Ini berarti bahwa meskipun tidak berpendidikan tinggi, namun responden memiliki pengalaman kerja yang cukup lama, sehingga responden betul-betul memahami apa yang dibutuhkan oleh perusahaannya.

Responden tersebar di 5 (lima) kabupaten yang sebelumnya sudah diputuskan sebagai wilayah sampel penelitian. Kelima wilayah tersebut adalah Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dari kelima kabupaten tersebut, 75 persen alamat perusahaan berada di Kota Jambi, 16,33 persen masing-masing berada di Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Selebihnya, tersebar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Sarolangun masing-masing sebesar 14,29 persen.

Distribusi perusahaan berdasarkan bidang usaha adalah sebagai berikut: 18,37 persen bergerak di sektor perkebunan, 14,29 persen merupakan perusahaan pengolahan kopra, masing-masing 12,24 persen bergerak dalam usaha industri pengolahan kelapa sawit dan perhotelan, 10,29 persen bergerak di bidang perdagangan, sedangkan sisanya tersebar pada kegiatan lainnya seperti perbunkan, crumb rubber, developer, perusahaan air minum, listrik, lywood, pertambangan, telekomunikasi dan lain sebagainya.

Berdasarkan orientasi pasar, sebagian besar responden atau sekitar 51,02 persen memfokuskan produknya untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik, 18,37 persen mengarahkan produknya untuk ekspor, 18,37 persen pula responden yang hanya mengarahkan produknya untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal, sedangkan 12,24 persen berorientasi pasar regional dengan cara memasarkan produknya ke provinsi tetangga diantaranya ke provinsi Sumatera barat, Riau, dan Sumatera Selatan. 75,51 persen dari responden menyatakan bahwa mereka memiliki pesaing yang sangat banyak, dan hanya 8,16 persen responden yang menyatakan memiliki pesaing yang sedikit.

5.2 Analisis Daya Tarik Investasi

Hasil penelitian tentang faktor dan variabel yang menjadi daya tarik investasi di Provinsi Jambi disajikan pada Tabel 33. Dengan menggunakan metode AHP (*Analytical Hierarchy Process*), survei ini dapat menghitung bobot faktor dan melakukan pemeringkatan terhadap bobot faktor penentu investasi daerah. Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa faktor Kelembagaan memiliki bobot paling besar yakni sebesar 41%, kemudian diikuti oleh faktor sosial politik sebesar 28 persen, infrastruktur fisik 31 persen, ekonomi daerah 12 persen dan tenaga kerja 6 persen.

Tabel 3. Faktor dan Variabel Daya Tarik Investasi di Provinsi Jambi (Level I)

Dayatarik investasi		
Nama	Bobot	Prioritas Relatif
Kelembagaan	0,4101	P1
Sosial politik	0,2791	P2
Infrastruktur fisik	0,1285	P3
Ekonomi daerah	0,1219	P4
Tenaga kerja	0,0605	P5

Temuan ini menunjukkan bahwa daya tarik utama dari investasi terletak pada faktor kelembagaan. Indikator dari faktor kelembagaan terdiri dari aparatur dan pelayanan, peraturan dan kebijakan daerah, keuangan daerah, dan kepastian hukum. Ini berarti bahwa calon investor menginginkan suatu kelembagaan pemerintah yang baik yang mampu melayani investor dengan baik, memiliki perda dan kebijakan daerah yang lebih menjamin keberlangsungan investasi, dengan kondisi keuangan daerah yang lebih baik serta adanya kepastian hukum sehingga para investor bisa bersandar kepada hukum apabila terjadi sesuatu masalah dengan aktivitas penanaman modal mereka.

Faktor daya tarik investasi pada level kedua disajikan pada tabel 34. Seperti terlihat pada tabel tersebut, pada level kedua daya tarik investasi tertinggi terletak pada aparatur dan pelayanan dengan bobot tertinggi 96 persen, diikuti oleh perda dan kebijakan dengan bobot 78,55, diikuti oleh kepastian hukum 77,27. Ketersediaan infrastruktur fisik menjadi prioritas keempat bagi investor dalam melakukan pertimbangan berinvestasi di Provinsi Jambi. Ini berarti bahwa sarana dan prasarana transportasi, komunikasi dan hal yang berkaitan dengan itu juga menjadi salah satu pertimbangan utama bagi investor. Temuan menunjukkan bahwa kualitas infrastruktur termasuk jalan menjadi pertimbangan kedelapan, dibawah faktor keamanan dan kondisi sosial politik. Ini berarti bahwa yang paling penting bagi investor adalah tersedianya infrastruktur fisik terlebih dahulu, sedangkan kualitasnya bisa dilakukan secara bertahap. Faktor penting lainnya yang

menjadi pertimbangan seorang investor untuk masuk ke Jambi adalah ketersediaan perbankan. Hal ini cukup beralasan karena ketersediaan bank merupakan salah satu indikator kemudahan akses yang berkaitan dengan masalah keuangan. Dalam konteks daya tarik investasi di provinsi Jambi, perbankan menempati prioritas pertimbangan yang kelima.

Tabel 4. Faktor dan Variabel Daya Tarik Investasi di Provinsi Jambi (Level 2)

Nama	Bobot	Prioritas
Aparatur dan Pelayanan	95,98	P1
Perda dan kebijakan	78,55	P2
Keuangan daerah	54,06	P11
kepastian hukum	77,27	P3
Keamanan	56,23	P6
Sospol	56,01	P7
Budaya	37,7	P14
Produktivitas tenaga kerja	50,00	P10
Biaya tenaga kerja	45,75	P13
Ketersediaan tenaga kerja	49,78	P12
Ketersediaan infrastruktur fisik	67,5	P4
Kualitas infrastruktur fisik	54,07	P8
Potensi ekonomi	54,06	P9
Struktur ekonomi	33,34	P15
Perbankan	59,42	P5

Sumber: Diolah dari data primer

Struktur ekonomi ternyata tidak menjadi pertimbangan utama atau tidak menjadi daya tarik utama investor dalam berinvestasi. Indikasi ini terlihat dari posisi variabel ini yang ternyata menjadi pertimbangan paling akhir. Ukuran-ukuran dari struktur ekonbomi adalah nilai tambah sektor primer, nilai tambah sektor sekunder dan nilai tambah sektor tersier.

Variabel ketersediaan tenaga kerja, biaya tenaga kerja, serta produktivitas tenaga kerja lokal yang selama ini sering dianggap sebagai faktor yang cukup menentukan daya tarik investasi ternyata tidak menjadi pertimbangan utama. Ketiga variabel tersebut yaitu produktivitas tenaga kerja, ketersediaan tenaga kerja, dan biaya tenaga kerja berturut-turut hanya menjadi prioritas pertambangan yang ke 10, 12, dan 13. Temuan ini menunjukkan bahwa alasan tenaga kerja murah dan banyaknya tersedia tenaga kerja tidak mampu meningkatkan daya tarik investasi di provinsi Jambi.

Bila dibandingkan dengan temuan KPPOD (2003), ternyata temuan ini juga konsisten dengan KPPOD yang menyatakan bahwa faktor kelembagaan dan sosial politik adalah dua faktor utama yang menjadi prioritas pertimbangan daya tarik investasi. Namun demikian, terdapat perbedaan dalam kasus infrastruktur fisik dan potensi ekonomi. KPPOD (2003) menyatakan bahwa potensi ekonomi

merupakan variabel yang menjadi pertimbangan ketiga, sementara temuan ini menemukan bahwa infrastruktur fisik adalah faktor penentu ketiga, jadi bukan kondisi ekonomi daerah. Temuan KPPOD (2003) malah menyatakan bahwa untuk level 1, infrastruktur fisik adalah prioritas terakhir bersamaan dengan variabel tenaga kerja.

Penelitian tentang daya tarik investasi juga pernah dilakukan oleh Kuncoro (2004) yang mengambil lokasi penelitian di Yogyakarta. Temuannya relatif konsisten dengan hasil penelitian ini. Namun demikian terdapat perbedaan didalam menempatkan variabel infrastruktur fisik dan sosial politik. Kuncoro menemukan bahwa variabel infrastruktur fisik menempati prioritas kedua, sedangkan kondisi sosial politik justru menempati posisi ketiga. Dalam penelitian ini, kondisi sosial politik menjadi prioritas pertambahan yang kedua, sementara infrastruktur fisik menjadi pertimbangan yang ketiga. Perbedaan temuan ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan persepsi pengusaha di dalam memandang suatu daerah. Temuan ini sekaligus menunjukkan bahwa ternyata yang menjadi pertimbangan utama investor dalam berinvestasi bukanlah faktor ekonomi, tapi faktor non ekonomi.

5.3. Stagnasi investasi di Provinsi Jambi

Pertanyaan yang muncul adalah kenapa investasi di provinsi Jambi terutama yang berbentuk PMA dan PMDN tidak mengalami perkembangan yang signifikan dan bahkan cenderung stagnan?. Dalam ilmu ekonomi, terdapat teori alternatif yang menyebutkan adanya efek tularan (*contagion effect*) yang merupakan dampak dari faktor eksternal. Tak dapat dipungkiri bahwa faktor eksternal seperti lesunya iklim investasi di level nasional, melemahnya sektor finansial, serta fluktuasi ekonomi dunia yang menunjukkan konyungtur menurun ikut berpengaruh kepada paceklik investasi di provinsi Jambi. Namun demikian jika provinsi Jambi mampu memanfaatkan momen seperti ini, ketidak bergairahan penanam modal di daerah lain justru bisa dimanfaatkan oleh provinsi Jambi untuk menarik investor masuk ke Jambi.

Berdasarkan pengamatan empiris, faktor kelembagaan dan sosial politik, serta infrastruktur fisik relatif belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah. Pelayanan investasi di provinsi Jambi masih belum diikuti oleh niat pemerintah daerah seperti yang selama ini didengungkan. Sebagai contoh:

1. Sejak tahun 2000 pemerintah daerah telah menggaungkan akan melakukan sistem pelayanan satu atap atau satu pintu. Namun demikian, hingga tahun akhir tahun 2008 sistem pelayanan seperti itu juga belum terwujud. Kesenjangan seperti ini bisa menjadi indikasi bahwa masih lemahnya sistem kelembagaan sehingga keinginan pemerintah (*political will*) mewujudkan program yang telah dicanangkan tidak dapat terlaksana.
2. Sejak lama pemerintah provinsi Jambi telah membuat rencana untuk menerbitkan Perda yang mampu menunjang iklim investasi yang kondusif, namun lagi-lagi sampai dengan akhir 2008 rencana tersebut juga belum terwujud. Pengalaman ditunjukkan oleh Kalimantan Timur dan Banten

(tanggung) yang menerbitkan Perda tentang pelayanan penanaman modal, ternyata mendorong meningkatnya geliat investasi di daerah tersebut. Faktor sosial politik terutama adanya jaminan keamanan akan lebih menimbulkan rangsangan bagi investor untuk menanamkan modalnya di Jambi. Persoalan yang sering merebak adalah munculnya konflik lahan antara pengusaha dengan masyarakat. Karena ketiadaan perda, maka sengketa tersebut relatif sulit untuk diselesaikan.

3. Sejak jauh-jauh tahun pemerintah daerah telah berencana untuk membangun infrastruktur fisik yang memadai, antara lain adalah (a) membangun jalan darat yang menghubungkan sentra produksi di hulu provinsi sampai ke hilir provinsi sehingga produksi dapat diangkut secara lancar menuju daerah pemasaran, namun sampai sekarang belum terwujud. (b) membangun bandara internasional yang mampu melayani pesawat berbadan lebih besar dengan kapasitas penumpang yang banyak dan kenyamanan yang baik, sampai sekarang juga belum terwujud. (c) membangun pelabuhan Muara Sabak menjadi pelabuhan samudera, ternyata sampai saat ini juga belum terwujud.

Semua yang disebutkan diatas hanyalah sebagian dari variabel-variabel yang menjadi pertimbangan utama investor dalam menentukan pilihannya berinvestasi di suatu daerah. Pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator, dinamisator dan katalisator. Jika pemerintah daerah kurang tanggap atau lengah dalam memperhatikan ini semua, maka dapat dipastikan bahwa dana promosi investasi yang terus meningkat dan cukup menguras APBD provinsi Jambi akan tidak memiliki arti apa-apa jika hanya kebijakan pemerintah hanya sebatas statemen dan jargon politis saja.

Atas temuan dari penelitian ini, pemerintah daerah sebaiknya lebih menfokuskan lagi perhatiannya didalam membangun iklim investasi yang mampu menarik para investor, baik PMDN, PMA, maupun non fasilitas seperti di sektor riil. Hal ini dapat dilakukan dengan merespon secara positif apa yang telah diungkapkan oleh para pengusaha (investor) melalui penelitian ini. Secara jujur harus diakui bahwa untuk melakukan akselerasi pembangunan di provinsi Jambi, pemerintah dihadapkan kepada kendala (*constrain*) anggaran, sehingga suntikan dana dari pihak swasta menjadi salah satu sumber pendanaan yang penting.

5.4. **Kondisi Pelayanan Pengurusan Izin Usaha Di Provinsi Jambi**

Kondisi pelayanan yang diberikan aparat dan instansi terkait dalam hal pengurusan usaha disajikan pada tabel 5. Seperti ditampilkan pada tabel tersebut bahwa proses pengurusan persetujuan investasi masih harus ditingkatkan. Meski sebagian besar responden sudah menyatakan bahwa kondisi pelayanan aparatur dalam proses perizinan sudah cukup baik, namun banyak juga yang menyatakan bahwa kondisi pelayanan dalam pengurusan perizinan masih jelek. Dari 49 responden, 20,61 persen responden menyatakan bahwa proses pengurusan persetujuan investasi jelek, bahkan 6,12 persen responden menyatakan bahwa kondisi pelayanan dalam proses pengurusan perizinan sangat jelek.

Buruknya iklim investasi juga didukung oleh temuan yang menunjukkan bahwa masih adanya pungutan tak resmi (dalam kuesioner disebut sebagai biaya

tambahan) dalam pengurusan izin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 73,46 persen responden menyatakan masih ada biaya siluman atau pungutan tak resmi. Dari total responden, 44 persen diantaranya menyatakan bahwa biaya siluman tergolong tinggi. Jika dikaitkan dengan proses perizinan, lamanya pengurusan izin menyebabkan para calon penanam modal harus mengeluarkan biaya tambahan tak resmi.

Tabel 5. Kondisi Pelayanan dalam Pengurusan Perizinan di Provinsi Jambi

Pelayanan Investasi	1	2	3	4	3	4
proses pengurusan persetujuan investasi	6,12	30,61	38,78	24,49	38,78	24,49
Mutu Pelayanan	14,29	12,24	38,78	30,61	38,78	30,61
Biaya Siluman	2,04	42,86	28,57	24,49	28,57	24,49
Infrastruktur Daerah	14,29	12,24	38,78	30,61	38,78	30,61

Tabel 5 juga memperlihatkan bahwa walau sebagaimana besar responden tidak terlalu mempermasalahkan infrastruktur fisik, namun 26,57 persen menyatakan infrastruktur daerah di provinsi Jambi belum memadai. Secara tegas 26,57 responden menyatakan bahwa infrastruktur daerah masih jelek. Ini berarti bahwa infrastruktur fisik masih perlu ditingkatkan.

VI. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan bahasan sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Aliran investasi masuk belum menunjukkan perkembangan yang signifikan di provinsi Jambi, terutama bila dibandingkan dengan anggaran yang dikeluarkan oleh daerah.
2. Faktor yang menjadi pertimbangan paling utama seorang pengusaha dalam berinvestasi adalah faktor kelembagaan. Faktor kedua adalah Sosial Politik, sementara yang ketiga adalah infrastruktur fisik. Faktor yang keempat adalah ekonomi daerah, sementara tenaga kerja adalah faktor yang terakhir.
3. Aparatur pelayanan, peraturan daerah, kepastian hukum, ketersediaan infrastruktur fisik dan keberadaan perbankan merupakan lima variabel yang paling menentukan daya tarik investasi di suatu daerah.
4. Sistem dan proses pelayanan investasi di provinsi Jambi belum maksimal. Sebagian investor masih mengeluhkan tentang proses pengurusan persetujuan izin usaha, dan adanya biaya siluman atau pungutan tak resmi, serta sistem pelayanan yang belum satu pintu. Disamping itu, lamanya pengurusan izin menyebabkan para calon penanam modal harus mengeluarkan biaya tambahan tak resmi.

6.2. Implikasi

1. Untuk meningkatkan daya tarik investasi, faktor kelembagaan harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Untuk itu kesiapan aparatur pelayanan termasuk pengurusan perizinan, pembuatan Peraturan Daerah yang mampu mendorong iklim investasi yang semakin kondusif serta upaya untuk

- memberikan kepastian hukum amat diperlukan. Atas dasar itu, maka peningkatan kinerja aparatur pelayanan termasuk di dalam memahami tupoksi, penerbitan Perda merupakan hal yang harus segera dilakukan.
2. Untuk dapat menarik investasi, kondisi sosial politik yang stabil adalah suatu hal yang mutlak diperlukan. Oleh karena itu pemerintah daerah harus tanggap dan sigap di dalam menyelesaikan sengketa atau konflik yang sering merebak di provinsi Jambi terutama antara masyarakat dengan perusahaan, antara karyawan dan pengusaha dan lain sebagainya.
 3. Ketersediaan infrastruktur fisik adalah salah satu variabel yang amat penting dan diperlukan oleh pengusaha. Atas dasar tersebut, maka program pemerintah untuk membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana infrastruktur fisik seperti jalan darat, lalu lintas udara, dan lalu lintas sungai harus segera ditindak lanjuti.
 4. Pemerintah daerah harus membuat aturan yang tegas dan jelas sehingga praktek pungutan liar atau biaya tambahan yang tak resmi, pengurusan perizinan dan lain sebagainya tidak lagi terjadi. Dengan demikian, diharapkan investasi di provinsi jambi akan bergairan kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim (2007). Rencana dan Realisasi Investasi di Provinsi Jambi, Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi Jambi. Jambi
- Haryadi (2007). Ekonomi Internasional. Buku Pertama: Teori dan Kebijakan. Penerbit Biografika, Jakarta
- ISEI (2006), "Rekomendasi Kebijakan Pemerintah. Langkah-Langkah Strategis Pemulihan Ekonomi Indonesia", Jakarta: Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia.
- KPPOD. (2002,2003). Daya Tarik Investasi Kabupaten/Kota di Indonesia, Jakarta:
- Kuncoro, M. (2004). Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang, Jakarta: Erlangga Kuncoro, M.
- Mankiw, 2000, Macroeconomics, fourth edition, Worth Publisher, United States of Amerika.
- Saaty, Thomas L. (2002). Hard Mathematics Applied to Soft Decisions dalam Indonesian Symposium Analytic Hierarchy Process II Teknik Industri Universitas Kristen Petra Surabaya, Tidak Dipublikasikan, Surabaya: Universitas Kristen Petra

Tambunan (2003), *Glibalisasi dan Perdagangan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta

World Bank (2005), *Iklm Investasi yang Lebih Baik bagi Setiap Orang*, Laporan Pembangunan Dunia 2005, The World Bank, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

WEF (2006), *The Global Competitiveness Report 2005-2006*, Geneva: World Economic Forum.